



**BIRO PEREKONOMIAN
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI
JAWA TIMUR**



RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan rasa puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat, hidayah dan ridho-Nya, maka pembuatan Rencana Kerja Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur Perubahan Tahun 2023 dapat disusun.

Menindaklanjuti Surat Edaran Gubernur Jawa Timur tanggal 9 Juni 2023, Nomor : 050/9907/201.2/2023 perihal Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023. Rencana Kerja ini memuat gambaran aktual rencana kerja dan anggaran untuk tahun 2022 sampai dengan 2023 berdasarkan tugas pokok dan fungsi organisasi Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur yang selaras dengan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Jawa Timur dan Perubahan RPJMD Pemerintah Provinsi Jawa Timur 2019 - 2024.

Program dan Kegiatan yang dituangkan dalam rencana kerja dan anggaran tahun 2023 ini merupakan penjabaran dari tugas organisasi yakni menyiapkan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi, pemantauan dan evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan teknis, administrasi dan sumber daya di bidang administrasi perekonomian pada tataran tahun berjalan, jangka pendek, menengah dan jangka panjang sehingga pada gilirannya diharapkan mampu mengakselerasi dan menjadi pemicu pertumbuhan perekonomian Jawa Timur menjadi lebih baik.

Akhirnya, dengan berucap syukur Alhamdulillah, semoga rencana kerja dan anggaran tahun 2023 ini dapat dijadikan acuan dan pedoman dalam mengimplementasikan tugas tugas kedinasan Biro Perekonomian di masa mendatang.

Surabaya, 30 Juni 2023

KEPALA BIRO PEREKONOMIAN


BUDI RAHARJO, SE, M.Si

Pembina Tingkat I
NIP. 19690527 199303 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI3	
DAFTAR TABEL	4
BAB I PENDAHULUAN	5
1.1. Latar belakang	6
1.2. Dasar Hukum.....	9
1.3. Maksud dan Tujuan.....	11
1.4. Sistematika Penulisan	12
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERKENAAN	14
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	14
2.2. Permasalahan dan Penyelesaian Masalah dalam Pelaksanaan Hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2023.....	30
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	32
3.1. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....	34
3.2. Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD	35
3.3. Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023.....	53
BAB IV PENUTUP.....	70
4.1. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan.....	70
4.2. Rencana Tindak Lanjut	70

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 Provinsi Jawa Timur	14
Tabel 3.1	Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur	36
Tabel 3.2	Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023.....	53



PEMERINTAH
PROVINSI JAWA TIMUR



BAB I

PENDAHULUAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Perekonomian Jawa Timur telah pulih dan memasuki tahap akselerasi. PDRB Jawa Timur Tahun 2022 berkontribusi sebesar 14,26% pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia dan berkontribusi sebesar 25,25% PDRB pulau Jawa. Hal ini juga didukung dengan peningkatan capaian PDRB per kapita Provinsi Jawa Timur sebesar 10,51% yaitu dari Rp. 60,05 Juta pada tahun 2021 menjadi Rp. 66,36 Juta pada tahun 2022 yang menunjukkan terjadinya peningkatan kesejahteraan masyarakat Jawa Timur.

Perekonomian Jawa Timur berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) pada tahun 2022 mencapai Rp. 2.730,91 Trilyun meningkat sebesar Rp. 276,42 Trilyun dibandingkan tahun sebelumnya. Sedangkan berdasarkan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) PDRB Jawa Timur pada tahun 2021 mencapai Rp. 1.669,12 1.757,82 Trilyun meningkat sebesar Rp. 89,08 Trilyun dibandingkan tahun sebelumnya.

Ekonomi Indonesia triwulan III-2022 terhadap triwulan III-2021 mengalami pertumbuhan sebesar 5,72 persen (y-on-y). Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 25,81 persen. Dari sisi pengeluaran, Komponen Ekspor Barang dan Jasa mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 21,64 persen.

Ekonomi Jawa Timur Triwulan III-2022 dibandingkan Triwulan III-2021 meningkat sebesar 5,58 persen (y-on-y). Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan yang tumbuh sebesar 28,02 persen. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Komponen Ekspor Luar Negeri yang tumbuh sebesar 8,53 persen.

Laju Inflasi Jawa Timur selama tahun 2022 mencapai 6.62 persen atau lebih tinggi dari inflasi nasional sebesar 5.42 persen. Inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga yang cukup tinggi, yang ditunjukkan oleh naiknya sebagian besar indeks kelompok pengeluaran. Dari sebelas kelompok pengeluaran, sepuluh kelompok mengalami inflasi, dan satu kelompok mengalami deflasi. Kelompok pengeluaran yang mengalami inflasi tertinggi adalah kelompok transportasi sebesar 16,98 persen, diikuti kelompok Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran 9,12 persen, Makanan, Minuman dan Tembakau 7,38 persen, Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya 6,15 persen, Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga 5,18 persen, Pendidikan 5,05 persen, Kesehatan 3,83 persen, Pakaian dan Alas Kaki 3,32 persen,

Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga 2,46 persen, Rekreasi, Olahraga, dan Budaya 1,97 persen, sedangkan kelompok pengeluaran yang mengalami deflasi adalah kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,13 persen.

Neraca Perdagangan Luar Negeri Jawa Timur Triwulan III 2022 defisit sebesar Rp. -52,64 Triliun. Sementara untuk baki neraca perdagangan antar daerah pada periode yang sama surplus sebesar Rp. 100,58 Triliun. Dari kedua pencapaian di atas, maka total neraca perdagangan Provinsi Jawa Timur Triwulan III 2022 surplus sebesar Rp. 47,94 Triliun. Sementara itu pada periode yang sama kinerja neraca perdagangan Nasional surplus sebesar 233,3 Triliun.

Berangkat dari kondisi empirik diatas, maka Biro Perekonomian Pemerintah Jawa Timur sangat berkepentingan terhadap akselerasi pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur khususnya pada tataran program dan kegiatan sektoral bidang perekonomian yang bersifat "on going" pada tahun berjalan. Oleh karenanya program dan kegiatan yang tercermin dalam rencana kerja dan anggaran perubahan tahun 2023 ini harus mampu menjadi pengungkit, pengakselerasi, memfasilitasi maupun mengkoordinasikan kebijakan sektoral bidang perekonomian guna menunjang keberlangsungan kinerja ekonomi riil di Jawa Timur menjadi lebih baik.

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Undang-Undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan Perangkat Daerah untuk menyusun Renja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun yang merupakan terjemahan dari perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 277 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Perencanaan pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah. Perencanaan pembangunan Daerah bertujuan untuk

mewujudkan pembangunan Daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di daerah masih diperlukan peningkatan pengintegrasian gender melalui penguatan kelembagaan, perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan yang responsif gender. Dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan pengarusutamaan gender, perlu menyempurnakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sehingga disusunlah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah.

Menindaklanjuti Pasal 6 dan Lampiran Huruf A angka 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah, Menteri Dalam Negeri melakukan pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur berdasarkan usulan pemerintah daerah, perubahan kebijakan dan atau peraturan perundang-undangan dilakukan dalam bentuk verifikasi dan validasi oleh Tim Pemutakhiran Klasifikasi Kodelikasi dan Nomenklatur sesuai dengan pemetaan untuk selanjutnya ditambahkan dalam database Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021.

Sebagai dokumen Perangkat daerah, Renja mempunyai kedudukan strategis dalam menjembatani perencanaan Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) sekaligus sebagai implementasi pelaksanaan strategi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dan Renstra Biro Perekonomian Perubahan II yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian visi dan misi daerah. Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2023, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Nomor 62 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 66 Tahun 2022 tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023, sehingga pelaksanaan Renja Biro Perekonomian dapat tercapai.

Dalam penyusunannya Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2023 didasarkan pada evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun 2023 Triwulan Kedua dan Evaluasi Kinerja terhadap pencapaian Perubahan Renstra II. Selain itu dokumen Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah ini disusun karena adanya penambahan target dan indikator sebagaimana tercantum pada dokumen Renstra Perubahan II Tahun 2023, dan pada akhirnya Perubahan Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai dasar penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2023.

1.2. Dasar Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023, adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 2286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender untuk Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi RRPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Nomor 4 Tahun 2008 Seri E);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Tahun 2009 Seri E);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 Nomor 1 Seri C);

18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender;
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024;
21. Peraturan Daerah Provinsi Jatim Nomor 14 Tahun 2022 tanggal 30 Desember 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2023;
22. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 39 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender;
23. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 108 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur;
24. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 52 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 - 2024;
25. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 35 Tahun 2022 tentang RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2023;
26. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 66 Tahun 2022 tanggal 7 November 2022 tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023;
27. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 89 Tahun 2022 tanggal 30 Desember 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2023

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2023 ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran dan menjabarkan tugas tugas organisasi di tahun 2023 mendatang sesuai tugas pokok dan fungsi Biro Perekonomian Provinsi Jawa Timur. Adapun tujuannya adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan informasi secara umum tentang rencana kerja dan anggaran Biro Perekonomian Pemerintah Provinsi Jawa Timur tahun 2023 sesuai Renstra Perubahan II Tahun 2019 - 2024;

- b. Memberikan informasi tentang Arah Kebijakan, Program dan Kegiatan Biro Perekonomian Provinsi Jawa Timur serta Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- c. Menyampaikan hasil evaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Biro Perekonomian tahun sebelumnya serta saran tindak lanjut pada hal-hal yang bersifat prioritas dan aktual.

1.4. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dokumen Rencana Kerja Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur Perubahan tahun 2023 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERKENAAN

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2023;
- 2.2. Permasalahan dan Penyelesaian Masalah dalam Pelaksanaan Hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2023;

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah;
- 3.2. Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2023;
- 3.3. Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023;

BAB IV PENUTUP

Berisi catatan penting Rancangan Perubahan Renja tahun 2023 Biro Perekonomian, kaidah-kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut



PEMERINTAH
PROVINSI JAWA TIMUR



BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERKENAAN

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN BERKENAAN

Pelaksanaan evaluasi sebagai sebagai salah satu fungsi peningkatan kualitas kinerja instansi pemerintah, dilaksanakan guna mengetahui program/kegiatan yang tidak memenuhi target, telah memenuhi target ataupun melebihi target kinerja yang direncanakan, sehingga atas dasar evaluasi pelaksanaan tersebut dapat diketahui:

1. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
2. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
3. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Evaluasi Rencana Kerja Perubahan Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur tahun 2023 didasarkan dan merujuk pada Renstra Perubahan II Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 - 2024.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja tahun 2023 dan pencapaian Renstra Perubahan II Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur sampai dengan Triwulan II tahun 2023 adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2. 1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023
Provinsi Jawa Timur

Perangkat Daerah : Biro Perekonomian

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2021			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan					
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 2023				
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)				
2021														
4	01	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase indikator program yang tercapai	100%	95,76%	100%	95,71%	95,71%	100%	100%	100%
						Persentase realisasi anggaran	93%	98,13%	98%	89,6%	96%	92%	92%	92%
						Indeks Profesionalitas ASN	69	57	67	65,45	95%	68	68	68
4	01	01	101		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran Perangkat Daerah	18	0	6	6	100,00%	6	12	66,67%
						Jumlah dokumen pelaporan perangkat daerah	9	0	3	3	100,00%	3	6	66,67%
						Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan	28	12						

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2021			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan					
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 2023				
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)				
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												
4	01	01	101	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11	1	4	4	100,00%	3	8	72,73%
4	01	01	101	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4	1	1	1	100,00%	1	3	75%
4	01	01	101	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	4	2	1	1	100,00%	1	4	100%
4	01	01	101	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan DPA-SKPD	4	1	1	1	100,00%	1	3	75%
4	01	01	101	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	4	2	1	1	100,00%	1	4	100%
4	01	01	101	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	10	4	3	3	100,00%	3	10	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2021			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan					
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 2023				
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)				
		Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD												
		Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD												
4	01	01	101	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13	1	4	4	100,00%	4	9	69,23%
4	01	01	102		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan	36	0	12	12	100,00%	12	24	66,67%
						Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	32	57						
4	01	01	102	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	13	12	12	12	100,00%		12	92%
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100					50	50	50%
4	01	01	102	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	37	12	12	12	100,00%	12	36	97,27%
4	01	01	102	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	37	12	12	12	100,00%	12	36	97,27%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2021			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan					
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 2023				
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)				
4	01	01	102	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	37	6	12	12	100,00%	12	30	81,08%
4	01	01	102	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7	1	2	2	100,00%	2	5	71,42%
4	01	01	102	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	4	1	1	1	100,00%	1	3	75%
4	01	01	102	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	37	12	12	12	100,00%	12	36	97,27%
4	01	01	102	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	4	1	1	1	100,00%	1	3	75%
4	01	01	103		Administrasi Barang Milik Daerah pada	Jumlah Laporan Pengelolaan Barang	12	0	4	4	100,00%	4	8	66,67%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2021			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan				
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 2023			
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)			
	Perangkat Daerah	Milik Daerah											
		Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	12	9					9	75%			
4	01	01	103	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	13	1	1	100,00%	4	6	46,15%
4	01	01	103	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	13	4	4	100,00%	4	12	92,31%
4	01	01	103	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4	4	1	100,00%	1	6	150,00%
4	01	01	105		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	36		12	100,00%	12	24	66,67%
						Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	13	27				27	207,69%
4	01	01	105	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan	37	12	12	100,00%	12	36	97,29%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2021			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan				
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 2023			
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)			
		Kepegawaian	Administrasi Kepegawaian										
4	01	01	105	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	37	12	12	100,00%	12	36	97,29%
4	01	01	105	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2				1	1	50,00%
						Jumlah Dokumen Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	2	2	1	1	100,00%	3	150,00%
4	01	01	105	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen telaahan / bahan rumusan kebijakan tentang Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
4	01	01	106		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa	36		12	100,00%	12	24	66,67%
						Jumlah daftar arsip inaktif	4		1	100,00%	1	2	50%
						Jumlah daftar arsip	4		1	100,00%	1	2	50%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2021			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan					
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 2023				
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)				
		vital												
		Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	24	41					41	170,83%				
4	01	01	106	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Dokumen Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4	12	4	4	100,00%		16	400%
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8					4	4	50,00%
4	01	01	106	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4	12	2	2	100,00%		14	350,00%
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	8					4	1	50,00%
4	01	01	106	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Dokumen Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan	7	12	2	2	100,00%		14	200,00%
						Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4					2	2	50,00%
4	01	01	106	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Dokumen Fasilitasi Kunjungan	4	3	1	1	100,00%		1	25,00%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2021			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan					
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 2023				
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)				
		Tamu												
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	24					12	12	50,00%				
4	01	01	106	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4	1	1	100,00%	2	50,00%		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2				1	50,00%		
4	01	01	106	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4	1	4	100,00%	1	6	150,00%	
4	01	01	107		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Sarana dan Prasarana	12		4	4	100,00%	4	8	66,67%
						Jumlah Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12	3		0,00%	3	3	25,00%	
4	01	01	107	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Dokumen Pengadaan Mebel	4	1	0	0	0,00%	1	1	25,00%
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan					0	0	0,00%	
4	01	01	107	06	Pengadaan Peralatan dan	Jumlah Dokumen	4	1	1	1	100,00%	2	2	50,00%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2021			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan				
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 2023			
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)			
	Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya											
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2					1	1	50,00%			
4	01	01	107	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Dokumen Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4	4		4	100%		
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		1			0	0%		
4	01	01	108		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8	8		8	100%		
					Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		12	4	4	100,00%	4	8	66,67%
4	01	01	108	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4	1	1	100,00%	1	1	50%
					Jumlah Laporan		2			1	1	50%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2021			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan					
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 2023				
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)				
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat												
4	01	01	108	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	37	1	12	12	100,00%		13	35,14%
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24					12	12	50,00%
4	01	01	108	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4	1	1	1	100,00%		2	50,00%
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2					1	1	50,00%
4	01	01	108	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Dokumen Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4	1	1	1	100,00%		2	50,00%
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2					1	1	50,00%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2021			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan					
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 2023				
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)				
4	01	01	109		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan aset tetap yang terpelihara	12		4	4	100,00%	4	8	66,67%
						Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8		2				2	25,00%
4	01	01	109	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Dokumen Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4		1	1	100,00%		2	50,00%
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2					1	1	50,00%
4	01	01	109	08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Dokumen Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	4		1	1	100,00%		2	50,00%
						Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	4					1	1	25,00%
4	01	06			Program : Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase Rumusan Kebijakan Program Perekonomian dan Pembangunan	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	01	06	101		Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi	Jumlah Kebijakan Lingkup Bidang Pengelolaan	12		2	3	100,00%	3	8	66,67%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2021			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan					
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 2023				
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)				
	Perekonomian	Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian												
		Persentase Rumusan Kebijakan atas Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	100,0%	66,7%	100,0%	100,0%	100,00%	100,0%	100%	100%				
4	01	06	101	01	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	Jumlah Dokumen telaahan / bahan rumusan kebijakan tentang Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	4	0	1	2	200,00%	1	3	75,00%
4	01	06	101	02	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	Jumlah Dokumen telaahan / bahan rumusan kebijakan tentang Fasilitasi Pengelolaan kebijakan Ekonomi Mikro	8	2	2	1	50,00%	2	5	62,5%
4	01	06	102		Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	1. Jumlah Kebijakan Lingkup Bidang Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	12	2	3	3	100,00%	3	8	66,67%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2021			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan				
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 2023			
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)			
		Persentase Rumusan Kebijakan atas Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	100,00%	66,67%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100%			
4	01	06	102	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	1. Jumlah Dokumen telaahan / bahan rumusan kebijakan tentang Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	4	1	1	100,00%	1	3	75,00%
4	01	06	102	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	2. Jumlah Dokumen telaahan / bahan rumusan kebijakan tentang Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	4	0	1	100,00%	1	2	50,00%
4	01	06	102	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	3. Jumlah Dokumen telaahan / bahan rumusan kebijakan tentang Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan	4	1	1	100,00%	1	3	75,00%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2021			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan					
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 2023				
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)				
		Energi dan Air												
4	01	06	103		Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	20	7	5	5	100,00%	5	17	85,00%	
					Persentase Rumusan Kebijakan atas Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	100%	140%	100%	100%	100,00%	1	100%	100,00%	
4	01	06	103	01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	Jumlah Dokumen telaahan / bahan rumusan kebijakan tentang Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	4	7	1	2	200,00%	1	10	250,00%
4	01	06	103	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Jumlah Dokumen telaahan / bahan rumusan kebijakan tentang Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan	4	0	2	1	50,00%	2	3	75,00%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2021			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan					
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 2023				
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Pendirian BUMD												
4	01	06	103	04	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	Jumlah Dokumen telaahan / bahan rumusan kebijakan tentang Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi kebijakan Pengelolaan BLUD	8	0	1	1	100,00%	1	2	25,00%
4	01	06	103	05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BLUD	Jumlah Dokumen telaahan / bahan rumusan kebijakan tentang Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BLUD	4	0	1	1	100,00%	1	2	50,00%

2.2. Permasalahan dan Penyelesaian Masalah dalam Pelaksanaan Hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2023

Pada Tahun 2023 ditengah ketidakpastian ekonomi global sebagai akibat Perang antara Rusia dengan Ukraina, dan pemulihan ekonomi global pasca covid-19 pada tahun 2022, berdampak pada pertumbuhan ekonomi Indonesia serta kenaikan inflasi yang bersumber dari meningkatnya permintaan, sehingga berdampak pada pencapaian program dan kegiatan sebagaimana ditargetkan.

Selain itu permasalahan yang dihadapi pada tahun 2023 adalah tidak seimbangnya rasio pegawai yang pensiun dengan pegawai yang masuk, kompetensi pegawai yg belum merata, masih kurangnya koordinasi antar unit kerja atau stakeholder, dan kurangnya monitoring evaluasi terkait pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2023. Kemudian solusi atas permasalahan tersebut adalah melakukan rekrutmen pegawai sesuai dengan kebutuhan kerja biro Perekonomian, melakukan pemetaan sumber Daya Manusia sebagai dasar untuk dilakukan pelatihan dan pendidikan, meningkatkan komunikasi dan koordinasi antarunit kerja melalui rapat secara rutin, penggunaan alat komunikasi yang efektif, pembentukan tim koordinasi yang bertanggung jawab untuk memastikan kelancaran pelaksanaan program, dan membentuk sistem pooling data berbasis cloud, dan spreadsheet sebagai sarana pengumpulan data dalam melakukan monev pelaksanaan program dan kegiatan.



PEMERINTAH
PROVINSI JAWA TIMUR



BAB III
TUJUAN DAN SASARAN
PERANGKAT DAERAH

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Dalam perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah selain didasarkan pada rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah juga dilakukan penelaahan terhadap Kebijakan Nasional.

Kebijakan Provinsi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024, arah kebijakan pembangunan provinsi pada RKPD Provinsi Jawa Timur 2021 adalah:

1. Prioritas Provinsi 1 : Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah sektor Sekunder dan Pariwisata

Arah Kebijakan:

- a. Jatim Sejahtera – Mengentaskan kemiskinan menuju keadilan dan kesejahteraan sosial
 - b. Jatim Kerja – Memperluas lapangan pekerjaan dan membangun keunggulan ekonomi
 - c. Jatim Agro – Memajukan Sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan, Kehutanan, Perkebunan berbasis kerakyatan
 - d. Jatim Berdaya – Ekonomi kerakyatan dengan basis UMKM, Koperasi, MUMDesa dan mendorong pemberdayaan pemerintahan desa
 - e. Jatim Harmoni – Menjaga harmoni sosial dan alam dengan melestarikan kebudayaan dan lingkungan hidup
2. Prioritas Provinsi 2 : Penguatan Konektivitas Antar Wilayah dalam Upaya Pemerataan Hasil Pembangunan serta Peningkatan Layanan Infrastruktur

Arah Kebijakan:

- a. Jatim Akses
3. Prioritas Provinsi 3 : Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan

Arah Kebijakan:

- a. Jatim Akses
- b. Jatim Kerja - Memperluas lapangan pekerjaan dan membangun keunggulan

ekonomi

- c. Jatim Berdaya - Ekonomi kerakyatan dengan basis UMKM, Koperasi, MUMDesa dan mendorong pemberdayaan pemerintahan desa
 - d. Jatim Harmoni - Menjaga harmoni sosial dan alam dengan melestarikan kebudayaan dan lingkungan hidup
 - e. Jatim Cerdas dan Sehat – Jawa Timur Cerdas dan sehat, Pelayanan Dasar berkualitas
4. Prioritas Provinsi 4 : Peningkatan Kepedulian Sosial dan Pelestarian Nilai – Nilai Budaya Lokal

Arah Kebijakan:

- a. Jatim Berkah – Membangun karakter masyarakat yang berbasis nilai-nilai kesalehan sosial, budi pekerti luhur dan berintegritas
 - b. Jatim Harmoni - Menjaga harmoni sosial dan alam dengan melestarikan kebudayaan dan lingkungan hidup
 - c. Jatim Amanah – Menyelenggarakan Pemerintah yang bersih, efektif dan anti korupsi
5. Prioritas Nasional 5 : Peningkatan Kemandirian Pangan, dan Pengelolaan Sumber Daya Energi

Arah Kebijakan:

- a. Jatim Akses
 - b. Jatim Agro – Memajukan Sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan, Kehutanan, Perkebunan berbasis kerakyatan
 - c. Jatim Harmoni - Menjaga harmoni sosial dan alam dengan melestarikan kebudayaan dan lingkungan hidup
6. Prioritas Provinsi 6 : Peningkatan Ketahanan Bencana dan Kualitas Lingkungan Hidup

Arah Kebijakan:

- a. Jatim Harmoni - Menjaga harmoni sosial dan alam dengan melestarikan kebudayaan dan lingkungan hidup
7. Prioritas Provinsi 7 : Peningkatan Kententraman, ketertiban umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur

Arah Kebijakan:

- a. Jatim Amanah - Menyelenggarakan Pemerintah yang bersih, efektif dan anti korupsi
- b. Jatim Harmoni - Menjaga harmoni sosial dan alam dengan melestarikan

kebudayaan dan lingkungan hidup

- c. Jatim Cerdas dan Sehat – Jawa Timur Cerdas dan sehat, Pelayanan Dasar berkualitas

3.1. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran Renja Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur 2023 didasarkan pada perumusan tujuan dan sasaran yang didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Perubahan Rencana Strategis Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut :

Misi	Tujuan / Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	TARGET				
			2020	2021	2022	2023	2024
Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Inovatif, Terbuka, Partisipatoris Memperkuat Demokrasi Kewargaan untuk Menghadirkan Ruang Sosial yang menghargai prinsip Kebhinekaan	Tujuan						
	Terwujudnya Kebijakan Bidang Perekonomian	Jumlah Kebijakan Lingkup Bidang Perekonomian	9	11	11	11	11
	Sasaran						
	Meningkatnya Penyediaan rekomendasi kebijakan lingkup bidang perekonomian	Persentase Rekomendasi Bidang Perekonomian yang ditindaklanjuti	100	100	100	100	100
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP	-	-	80.01	80.02	80.03

Dengan berlandaskan misi yang telah ditetapkan, maka Biro Perekonomian Provinsi Jawa Timur menetapkan tujuan dan sasaran dengan tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. Menyiapkan perumusan kebijakan di bidang perekonomian;
2. Melaksanakan koordinasi, pembinaan dan penyusunan program kegiatan serta petunjuk teknis pelaksanaan di bidang kebijakan dan sarana perekonomian, sumber daya alam, BUMD, investasi daerah dan BLUD;
3. Melaksanakan pelaksanaan pembinaan administrasi pemerintahan dan pembangunan serta sumber daya aparatur di bidang perekonomian;
4. Menyiapkan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi

pencapaian tujuan kebijakan di bidang kebijakan dan sarana perekonomian, sumber daya alam, dan BUMD, investasi daerah dan BLUD.

Strategi adalah cara untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program. Strategi merupakan suatu rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya mewujudkan tujuan dan sasaran dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya organisasi dan keadaan lingkungan yang dihadapi. Penjabaran pertama dari strategi adalah berupa kebijakan, yaitu ketentuan-ketentuan yang ditetapkan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pelaksanaan program dan kegiatan, guna kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, dan misi organisasi. Penjabaran selanjutnya adalah berupa program, yaitu kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran tertentu sesuai dengan indikator sasaran yang telah ditetapkan.

3.2. Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD

Sejalan dengan arah pembangunan dalam Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 - 2024, maka kebijakan bidang perekonomian diarahkan pada Visi Pemerintah Provinsi Jawa Timur:

“Terwujudnya Masyarakat Jawa Timur yang Adil, Sejahtera, Unggul dan Berakhlak dengan Tata Kelola Pemerintahan yang Partisipatoris Inklusif melalui Kerja Bersama dan Semangat Gotong Royong”

Untuk menjadi landasan bagi penentuan dan pelaksanaan fungsi regulasinya dengan mendapatkan input kebijakan yang berakar pada isu-isu yang berkembang di masyarakat, sehingga Birokrasi pemerintah sebagai Birokrasi publik dalam melaksanakan program dan kegiatannya tidak terlepas dari kebutuhan masyarakat itu sendiri yang memerlukan pelayanan publik pemerintah.

Untuk mewujudkan visi pembangunan Jawa Timur 2020 - 2024 tersebut, ditempuh melalui 4 misi utama, antara lain:

- Misi Pertama : Mewujudkan Kesimbangan Pembangunan Ekonomi, baik antar Kelompok, Sektor dan Keterhubungan Wilayah.
- Misi Kedua : Terciptanya Kesejahteraan yang Berkeadilan Sosial, Pemenuhan Kebutuhan Dasar Terutama Kesehatan dan Pendidikan, Penyediaan Lapangan Kerja dengan Memperhatikan Kelompok Rentan.
- Misi Ketiga : Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Inovatif, Terbuka, Partisipatoris Memperkuat Demokrasi Kewargaan untuk Menghadirkan Ruang Sosial yang menghargai prinsip Kebhinekaan.

- Misi Keempat: Melaksanakan Pembangunan Berdasarkan Semangat Gotong Royong, Berwawasan Lingkungan untuk Menjamin Keselarasan Ruang Ekologi, Ruang Sosial, Ruang Ekonomi dan Ruang Budaya.

Berdasarkan hasil kajian terhadap kondisi Provinsi Jawa Timur dari berbagai aspek pembangunan dan berdasarkan berbagai isu dan kebijakan di tingkat global, nasional maka dapat dirumuskan beberapa masalah kebijakan serta isu strategis Provinsi Jawa Timur. Isu strategis Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 sebagai berikut :

1. Kualitas Sumber Daya Manusia Berbasis Keagamaan dan Kebudayaan
2. Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi serta Kesejahteraan Masyarakat
3. Tata Kelola Pemerintah dan Reformasi Birokrasi
4. Demokrasi Kewargaan
5. Pembangunan Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan dan Berkelanjutan
6. Penanganan Pandemi Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Jawa Timur

Tugas dan Fungsi Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur, tergambar dalam Misi Ke-Tiga yaitu, Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Inovatif, Terbuka, Partisipatoris Memperkuat Demokrasi Kewargaan untuk Menghadirkan Ruang Sosial yang menghargai prinsip Kebhinekaan dengan rincian agenda sebagai berikut :

Tabel 3.1
Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2023
Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur

Nama Perangkat Daerah : Biro Perekonomian

No	Rancangan RKPD Perubahan					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp 000)	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja (Kepmendagri Nomor 050 – 5889)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
					20.549.332.000					20.549.332.000	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jawa Timur	Persentase indikator program yang tercapai		11.572.229.465	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jawa Timur	Persentase indikator program yang tercapai	100%	11.572.229.465	
			Persentase realisasi anggaran					Persentase realisasi anggaran	92%		
			Indeks profesionalitas ASN					Indeks profesionalitas ASN	68		

No	Rancangan RKPD Perubahan					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp 000)	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja (Kepmendagri Nomor 050 – 5889)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran Perangkat Daerah		313.341.165	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran Perangkat Daerah	6 dokumen	313.341.165	
								Jumlah dokumen pelaporan perangkat daerah	3 dokumen		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	88.700.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 dokumen	88.700.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	1 dokumen	3.680.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	3.680.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	3.680.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	3.680.000	

No	Rancangan RKPD Perubahan					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp 000)	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja (Kepmendagri Nomor 050 – 5889)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	6.520.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	6.520.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	6.520.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	6.520.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	192.191.165	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 laporan	192.191.165	

No	Rancangan RKPD Perubahan					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp 000)	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja (Kepmendagri Nomor 050 – 5889)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	12.050.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 laporan	12.050.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Keuangan		8.334.201.700	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Keuangan	12 laporan	8.334.201.700	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 Orang	7.973.279.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 orang/bulan	7.973.279.000	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen	259.754.400	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen	259.754.400	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	87.458.300	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	87.458.300	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 dokumen	2.510.000	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 dokumen	2.510.000	

No	Rancangan RKPD Perubahan					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp 000)	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja (Kepmendagri Nomor 050 – 5889)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 dokumen	2.505.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 laporan	2.505.000	
	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 dokumen	3.010.000	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 dokumen	3.010.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 dokumen	3.680.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	12 laporan	3.680.000	

No	Rancangan RKPD Perubahan					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp 000)	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja (Kepmendagri Nomor 050 – 5889)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	2.005.000	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	2.005.000	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah		83.510.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah	4 laporan	83.510.000	
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	4 dokumen	1.840.000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	4 dokumen	1.840.000	
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 dokumen	1.170.000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 laporan	1.170.000	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 dokumen	80.500.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 laporan	80.500.000	

No	Rancangan RKPD Perubahan					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp 000)	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja (Kepmendagri Nomor 050 – 5889)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Ketatatusahaan dan Kepegawaian		399.434.100	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Ketatatusahaan dan Kepegawaian	12 laporan	399.434.100	
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 dokumen	184.274.100	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 laporan	184.274.100	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	12 dokumen	7.680.000	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	12 laporan	7.680.000	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 dokumen	207.480.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 orang	207.480.000	
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	1 dokumen	0	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Dokumen telaahan / bahan rumusan kebijakan tentang Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	0 dokumen	0	

No	Rancangan RKPD Perubahan					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp 000)	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja (Kepmendagri Nomor 050 – 5889)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa		1.678.324.100	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa	12 laporan	1.678.324.100	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 dokumen	432.382.900	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 paket	432.382.900	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 dokumen	50.055.300	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 paket	50.055.300	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 dokumen	216.731.140	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	216.731.140	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	25 dokumen	22.750.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	22.750.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 dokumen	927.314.760	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 laporan	927.314.760	

No	Rancangan RKPD Perubahan					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp 000)	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja (Kepmendagri Nomor 050 – 5889)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 dokumen	29.090.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 dokumen	29.090.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Laporan Pengadaan Sarana dan Prasarana		250.670.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Laporan Pengadaan Sarana dan Prasarana	4 dokumen	250.670.000	
	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 dokumen	0	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 unit	0	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 dokumen	250.670.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 unit	250.670.000	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 dokumen	0	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 unit	0	

No	Rancangan RKPD Perubahan					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp 000)	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja (Kepmendagri Nomor 050 – 5889)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		352.264.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 laporan	352.264.000	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 dokumen	103.500.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	103.500.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 dokumen	37.200.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	37.200.000	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah paket pelaksanaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 dokumen	17.040.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 laporan	17.040.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 dokumen	194.524.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 laporan	194.524.000	

No	Rancangan RKPD Perubahan					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp 000)	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja (Kepmendagri Nomor 050 – 5889)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Laporan Aset Tetap yang Terpelihara		160.484.400	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Laporan Aset Tetap yang Terpelihara	4 laporan	160.484.400	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 dokumen	115.484.400	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 unit	115.484.400	
	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud		Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 dokumen	45.000.000	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud		Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 unit	45.000.000	
	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN		Persentase Rumusan Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan		8.977.102.535	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN		Persentase Rumusan Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan	100%	8.977.102.535	
	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian		Jumlah Kebijakan Lingkup Bidang Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian		3.182.669.255	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian		Persentase Rumusan Kebijakan atas Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	100%	3.182.669.255	

No	Rancangan RKPD Perubahan					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp 000)	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja (Kepmendagri Nomor 050 – 5889)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
								Jumlah Kebijakan Lingkup Bidang Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	3 dokumen		
	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro		Jumlah Dokumen telaahan / bahan rumusan kebijakan tentang Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	1 dokumen	1.085.241.303	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	1 dokumen	1.085.241.303	
	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro		Jumlah Dokumen telaahan / bahan rumusan kebijakan tentang Fasilitasi Pengelolaan kebijakan Ekonomi Mikro	2 dokumen	2.097.427.952	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	2 dokumen	2.097.427.952	
	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam		Jumlah Kebijakan Lingkup Bidang Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam		1.317.122.240	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam		Persentase Rumusan Kebijakan atas Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	100%	1.317.122.240	

No	Rancangan RKPD Perubahan					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp 000)	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja (Kepmendagri Nomor 050 – 5889)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
								Jumlah Kebijakan Lingkup Bidang Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	3 dokumen		
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan		Jumlah Dokumen telaahan / bahan rumusan kebijakan tentang Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	1 dokumen	660.874.500	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	1 dokumen	660.874.500	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup		Jumlah Dokumen telaahan / bahan rumusan kebijakan tentang Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	1 dokumen	271.555.753	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	1 dokumen	271.555.753	

No	Rancangan RKPD Perubahan					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp 000)	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja (Kepmendagri Nomor 050 – 5889)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air		Jumlah Dokumen telaahan / bahan rumusan kebijakan tentang Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	1 dokumen	384.691.987	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	1 dokumen	384.691.987	
	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD		Jumlah Kebijakan Lingkup Bidang Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD		4.477.311.040	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD		Persentase Rumusan Kebijakan atas Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	100%	4.477.311.040	
								Jumlah Kebijakan Lingkup Bidang Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	5 dokumen		

No	Rancangan RKPD Perubahan					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp 000)	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja (Kepmendagri Nomor 050 – 5889)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha		Jumlah Dokumen telaahan / bahan rumusan kebijakan tentang Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	1 dokumen	1.249.170.270	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	1 dokumen	1.249.170.270	
	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi		Jumlah Dokumen telaahan / bahan rumusan kebijakan tentang Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	0 dokumen	0	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	0 dokumen	0	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD		Jumlah Dokumen telaahan / bahan rumusan kebijakan tentang Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	2 dokumen	2.543.721.681	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	2 dokumen	2.543.721.681	

No	Rancangan RKPD Perubahan					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp 000)	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja (Kepmendagri Nomor 050 – 5889)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah		Jumlah Dokumen telaahan / bahan rumusan kebijakan tentang Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi kebijakan Pengelolaan BLUD	1 dokumen	393.933.530	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	1 dokumen	393.933.530	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BLUD		Jumlah Dokumen telaahan / bahan rumusan kebijakan tentang Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BLUD	1 dokumen	290.485.559	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BLUD		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BLUD	1 dokumen	290.485.559	

3.3. Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023

Rumusan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.2

Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023

Nama Perangkat Daerah : Biro Perekonomian

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan	Indikator Capaian Program/Kegiatan/Subkegiatan Sebelum Perubahan		LOKASI	Indikator Capaian Program/Kegiatan/Subkegiatan Setelah Perubahan		LOKASI PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	SUMBER DANA
		Tolak Ukur	Target		Tolak Ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40106	Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase Rumusan Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan	100%	Jawa Timur	Persentase Rumusan Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan	100%	Jawa Timur	9.955.969.998	8.977.102.535	-978.867.463	PAD
40106101	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	Jumlah Kebijakan Lingkup Bidang Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	3 dokumen		Persentase Rumusan Kebijakan atas Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	100%		3.696.185.162	3.182.669.255	-513.515.907	
		Jumlah Kebijakan Lingkup Bidang Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian			3 dokumen						

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan	Indikator Capaian Program/Kegiatan/Subkegiatan Sebelum Perubahan		LOKASI	Indikator Capaian Program/Kegiatan/Subkegiatan Setelah Perubahan		LOKASI PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	SUMBER DANA
		Tolak Ukur	Target		Tolak Ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Koordinasi Perekonomian						
4010610101	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	Jumlah Dokumen telaahan / bahan rumusan kebijakan tentang Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	1 dokumen		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	1 dokumen		757.849.797	1.085.241.303	327.391.506	
4010610102	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	Jumlah Dokumen telaahan / bahan rumusan kebijakan tentang Fasilitasi Pengelolaan kebijakan Ekonomi Mikro	2 dokumen		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	2 dokumen		2.938.335.365	2.097.427.952	-840.907.413	
40106102	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	Jumlah Kebijakan Lingkup Bidang Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi	3 dokumen		Persentase Rumusan Kebijakan atas Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	100%		1.100.977.743	1.317.122.240	-216.144.497	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan	Indikator Capaian Program/Kegiatan/Subkegiatan Sebelum Perubahan		LOKASI	Indikator Capaian Program/Kegiatan/Subkegiatan Setelah Perubahan		LOKASI PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	SUMBER DANA
		Tolak Ukur	Target		Tolak Ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Sumber Daya Alam			Jumlah Kebijakan Lingkup Bidang Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	3 dokumen					
4010610201	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen telaahan / bahan rumusan kebijakan tentang Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	1 dokumen		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	1 dokumen		375.193.681	660.874.500	285.680.819	
4010610202	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen telaahan / bahan rumusan kebijakan tentang Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan	1 dokumen		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	1 dokumen		295.151.823	271.555.753	-23.596.070	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan	Indikator Capaian Program/Kegiatan/Subkegiatan Sebelum Perubahan		LOKASI	Indikator Capaian Program/Kegiatan/Subkegiatan Setelah Perubahan		LOKASI PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	SUMBER DANA
		Tolak Ukur	Target		Tolak Ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		dan Lingkungan Hidup									
4010610203	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen telaahan / bahan rumusan kebijakan tentang Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	1 dokumen		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	1 dokumen		430.632.239	384.691.987	-45.940.252	
40106103	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	Jumlah Kebijakan Lingkup Bidang Bidang Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	6 dokumen		Persentase Rumusan Kebijakan atas Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	100%		5.158.807.093	4.477.311.040	-681.496.053	
					Jumlah Kebijakan Lingkup Bidang Bidang Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	5 dokumen					

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan	Indikator Capaian Program/Kegiatan/Subkegiatan Sebelum Perubahan		LOKASI	Indikator Capaian Program/Kegiatan/Subkegiatan Setelah Perubahan		LOKASI PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	SUMBER DANA
		Tolak Ukur	Target		Tolak Ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4010610301	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	Jumlah Dokumen telaahan / bahan rumusan kebijakan tentang Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	1 dokumen		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	1 dokumen		1.478.014.947	1.251.170.270	-226.844.677	
4010610302	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	Jumlah Dokumen telaahan / bahan rumusan kebijakan tentang Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	1 dokumen		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	0 dokumen		-	0	0	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan	Indikator Capaian Program/Kegiatan/Subkegiatan Sebelum Perubahan		LOKASI	Indikator Capaian Program/Kegiatan/Subkegiatan Setelah Perubahan		LOKASI PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	SUMBER DANA
		Tolak Ukur	Target		Tolak Ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4010610303	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Jumlah Dokumen telaahan / bahan rumusan kebijakan tentang Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	2 dokumen		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	2 dokumen		2.923.851.686	2.543.721.681	-380.130.005	
4010610304	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	Jumlah Dokumen telaahan / bahan rumusan kebijakan tentang Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi kebijakan Pengelolaan BLUD	1 dokumen		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	1 dokumen		435.674.914	393.933.530	-41.741.384	
4010610305	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BLUD	Jumlah Dokumen telaahan / bahan rumusan kebijakan tentang Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi	1 dokumen		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BLUD	1 dokumen		321.265.546	290.485.559	-30.779.987	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan	Indikator Capaian Program/Kegiatan/Subkegiatan Sebelum Perubahan		LOKASI	Indikator Capaian Program/Kegiatan/Subkegiatan Setelah Perubahan		LOKASI PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	SUMBER DANA
		Tolak Ukur	Target		Tolak Ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Kebijakan Pendirian BLUD									
XXX01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase indikator program yang tercapai	100%		Persentase indikator program yang tercapai	100%		12.330.470.002	11.572.229.465	-782.365.537	
					Persentase realisasi anggaran	98%					
					Indeks profesionalitas ASN	70					
XXX01101	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 dokumen		Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran Perangkat Daerah	6 dokumen		126.260.000	313.341.165	187.081.165	
					Jumlah dokumen pelaporan perangkat daerah	3 dokumen					
XXX0110101	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 dokumen		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 dokumen		92.840.000	88.700.000	-2.140.000	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan	Indikator Capaian Program/Kegiatan/Subkegiatan Sebelum Perubahan		LOKASI	Indikator Capaian Program/Kegiatan/Subkegiatan Setelah Perubahan		LOKASI PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	SUMBER DANA
		Tolak Ukur	Target		Tolak Ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
XXX0110102	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Penyusunan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen		2.840.000	3.680.000	840.000	
XXX0110103	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen		4.180.000	3.680.000	-500.000	
XXX0110104	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1 dokumen		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen		7.520.000	6.520.000	-1.000.000	
XXX0110105	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen		6.020.000	6.520.000	500.000	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan	Indikator Capaian Program/Kegiatan/Subkegiatan Sebelum Perubahan		LOKASI	Indikator Capaian Program/Kegiatan/Subkegiatan Setelah Perubahan		LOKASI PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	SUMBER DANA
		Tolak Ukur	Target		Tolak Ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
XXX0110106	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 dokumen		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 laporan		6.180.000	192.191.165	186.011.165	
XXX0110107	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 dokumen		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 laporan		6.680.000	12.050.000	5.370.000	
XXX01102	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8 dokumen		Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Keuangan	12 laporan		10.223.480.250	8.334.201.700	1.887.278.550	-
XXX0110201	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1 dokumen		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 orang/bulan		9.710.387.000	7.973.279.000	-1.737.108.000	
XXX0110202	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 dokumen		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen		401.112.000	259.754.400	-141.357.600	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan	Indikator Capaian Program/Kegiatan/Subkegiatan Sebelum Perubahan		LOKASI	Indikator Capaian Program/Kegiatan/Subkegiatan Setelah Perubahan		LOKASI PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	SUMBER DANA
		Tolak Ukur	Target		Tolak Ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
XXX10110203	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 dokumen		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen		90.901.250	87.458.300	-1.442.950	
XXX0110204	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 dokumen		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 dokumen		2.680.000	2.510.000	-170.000	
XXX0110205	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 dokumen		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 laporan		4.010.000	2.505.000	-1.505.000	
XXX0110206	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	1 dokumen		Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 dokumen		5.520.000	3.010.000	-2.510.000	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan	Indikator Capaian Program/Kegiatan/Subkegiatan Sebelum Perubahan		LOKASI	Indikator Capaian Program/Kegiatan/Subkegiatan Setelah Perubahan		LOKASI PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	SUMBER DANA
		Tolak Ukur	Target		Tolak Ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
XXX0110207	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 dokumen		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	12 laporan		6.860.000	3.680.000	-3.180.000	
XXX0110208	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen		2.010.000	2.005.000	-5.000	
XXX01103	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	3 dokumen		Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah	4 laporan		82.680.000	83.510.000	2.830.000	
XXX0110301	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 dokumen		Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	4 dokumen		1.340.000	1.840.000	500.000	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan	Indikator Capaian Program/Kegiatan/Subkegiatan Sebelum Perubahan		LOKASI	Indikator Capaian Program/Kegiatan/Subkegiatan Setelah Perubahan		LOKASI PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	SUMBER DANA
		Tolak Ukur	Target		Tolak Ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
XXX0110305	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 dokumen		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 laporan		1.340.000	1.170.000	-170.000	
XXX0110306	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 dokumen		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 laporan		80.000.000	80.500.000	2.500.000	
XXX01105	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	4 dokumen		Jumlah Dokumen Ketatatusahaan dan Kepegawaian	12 laporan		153.057.447	399.434.100	248.376.653	
XXX0110503	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Penolahan Administrasi Kepegawaian	1 dokumen		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 laporan		101.058.000	184.274.100	85.216.100	
XXX0110504	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 dokumen		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	12 laporan		7.680.000	7.680.000	0	
XXX0110509	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Dokumen Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	1 dokumen		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti	1 orang		44.319.447	207.480.000	163.160.553	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan	Indikator Capaian Program/Kegiatan/Subkegiatan Sebelum Perubahan		LOKASI	Indikator Capaian Program/Kegiatan/Subkegiatan Setelah Perubahan		LOKASI PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	SUMBER DANA
		Tolak Ukur	Target		Tolak Ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
XXX0110510	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Berdasarkan Tugas dan Fungsi			Pendidikan dan Pelatihan						
		Jumlah Dokumen telaahan / bahan rumusan kebijakan tentang Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	0 dokumen		Jumlah Dokumen telaahan / bahan rumusan kebijakan tentang Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	0 dokumen					
XXX01106	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	6 dokumen		Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa	12 laporan		1.361.566.873	1.678.324.100	306.757.227	
XXX0110602	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Dokumen Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 dokumen		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 paket		256.214.429	432.382.900	176.168.471	
XXX0110603	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1 dokumen		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 paket		35.530.000	50.055.300	14.525.300	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan	Indikator Capaian Program/Kegiatan/Subkegiatan Sebelum Perubahan		LOKASI	Indikator Capaian Program/Kegiatan/Subkegiatan Setelah Perubahan		LOKASI PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	SUMBER DANA
		Tolak Ukur	Target		Tolak Ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
XXX0110605	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Dokumen Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan	1 dokumen		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket		142.913.375	216.731.140	73.817.765	
XXX0110608	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Dokumen Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 dokumen		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan		23.620.000	22.750.000	-870.000	
XXX0110609	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 dokumen		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 laporan		875.689.069	927.314.760	41.625.691	
XXX0110610	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 dokumen		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 dokumen		27.600.000	29.090.000	1.490.000	
XXX01107	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3 dokumen		Jumlah Laporan Pengadaan Sarana dan Prasarana	4 dokumen		5.107.832	250.670.000	245.562.168	
XXX0110705	Pengadaan Mebel	Jumlah Dokumen Pengadaan Mebel	1 dokumen		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 unit		-	0		

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan	Indikator Capaian Program/Kegiatan/Subkegiatan Sebelum Perubahan		LOKASI	Indikator Capaian Program/Kegiatan/Subkegiatan Setelah Perubahan		LOKASI PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	SUMBER DANA
		Tolak Ukur	Target		Tolak Ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
XXX0110706	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Dokumen Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1 dokumen		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 unit		5.107.832	250.670.000	245.562.168	
XXX0110710	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Dokumen Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 dokumen		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 unit		-	0		
XXX01108	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 dokumen		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 laporan		224.703.800	352.264.000	129.360.200	
XXX0110801	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 dokumen		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan		101.980.000	103.500.000	3.520.000	
XXX0110802	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 dokumen		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan		33.818.800	37.200.000	3.381.200	
XXX0110803	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Peralatan dan	1 dokumen		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan	1 laporan		960.000	17.040.000	16.080.000	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan	Indikator Capaian Program/Kegiatan/Subkegiatan Sebelum Perubahan		LOKASI	Indikator Capaian Program/Kegiatan/Subkegiatan Setelah Perubahan		LOKASI PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	SUMBER DANA
		Tolak Ukur	Target		Tolak Ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Perlengkapan Kantor			Kantor yang Disediakan						
XXX0110804	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Dokumen Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1 dokumen		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 laporan		87.945.000	194.524.000	106.379.000	
XXX01109	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2 dokumen		Jumlah Laporan Aset Tetap yang Terpelihara	4 laporan		153.613.800	160.484.400	6.870.600	
XXX0110906	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Penyusunan Dokumen Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1 dokumen		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 unit		96.613.800	115.484.400	18.870.600	
XXX0110908	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Penyusunan Dokumen Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	1 dokumen		Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 unit		57.000.000	45.000.000	-12.000.000	



PEMERINTAH
PROVINSI JAWA TIMUR



BAB IV

PENUTUP

BAB IV

PENUTUP

Rancangan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 disusun dengan mengacu pada sasaran dan prioritas pembangunan Daerah, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif Perangkat Daerah Tahun 2023. Pelaksanaan program/kegiatan pada Biro Perekonomian Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2023 diharapkan berjalan lancar sesuai Rencana Kerja Tahun 2023 dan mengarah pada pencapaian hasil yang baik.

Dalam pelaksanaan tahun berjalan Renja Perubahan Tahun 2023 jika menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan hal-hal sebagaimana tercantum dalam RKPD Perubahan Provinsi Jawa Timur Tahun 2023, akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian dalam bentuk Renja Perubahan dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4.1. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Rancangan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023, merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah

Rancangan Rencana Kerja Perubahan 2023 ini merupakan pedoman bagi seluruh bagian di lingkungan Biro Perekonomian Jawa Timur dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatannya sekaligus sebagai acuan bagi *stakeholder* yang memiliki keterkaitan dengan program/kegiatan dimaksud.

4.2. Rencana Tindak Lanjut

Dengan ditetapkannya Rancangan Renja Perubahan Tahun 2023, selanjutnya akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.



BIRO PEREKONOMIAN
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR